

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem demokrasi modern, partai politik memiliki peranan penting sebagai pilar utama kehidupan politik dan sebagai sarana artikulasi serta agregasi kepentingan Masyarakat. Partai politik tidak hanya berfungsi untuk meraih kekuasaan, tetapi juga berperan dalam membangun kesadaran politik Masyarakat melalui proses pendidikan politik, kaderisasi, dan konsolidasi organisasi. Menurut Miriam Budiardjo (2008), menjelaskan definisi partai politik sebagai kelompok yang terorganisir yang memiliki anggota dengan kesamaan orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita dalam tujuannya dalam memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik. Duverger (1954) mendefinisikan partai politik sebagai “*school of democracy*” atau dapat dipahami sebagai sekolah politik. Definisi yang disampaikan Duverger tersebut dapat diartikan bahwa partai politik memiliki peranan untuk memberikan pendidikan politik dan membangun kesadaran politik pada Masyarakat. Selaras dengan itu, Budiardjo (2008) menegaskan bahwa partai politik sebagai sarana partisipasi politik yang memungkinkan warga negara ikut serta dalam pengambilan Keputusan politik melalui wakil-wakilnya di lembaga pemerintahan. Partisipasi Masyarakat dalam politik juga menjadi suatu hal yang sangat penting, demokrasi dikatakan sehat apabila masyarakatnya memiliki keterlibatan aktif dalam proses politik, baik melalui pemilu, diskusi publik, organisasi sosial, maupun keterlibatan dalam kegiatan partai. Maka, hal ini menjadi ruang strategis bagi partai politik dalam memainkan perannya sebagai jembatan antara rakyat dan negara. Almond & Verba (1963) dalam bukunya yang berjudul “*The Civic Culture*” menjelaskan bahwa partai politik berfungsi untuk menginternalisasikan kesadaran politik dan membangun budaya partisipatif bagi Masyarakat.

Partai politik-berdasarkan definisi yuridis pada UU Nomor 2 tahun 2008 pasal 1 ayat 1- merupakan suatu organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita (UU No. 2 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat 1).

Partai politik dalam sudut pandang yuridis melalui UU no.2 tahun 2011 pasal 11 huruf a, memiliki peran-kewajiban-untuk memberikan pendidikan politik bagi anggota dan Masyarakat luas untuk mewujudkan Masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya. Selain daripada memberikan pendidikan politik, partai politik juga berperan sebagai medium bagi Masyarakat untuk menyampaikan aspirasi politiknya dalam agenda mengawal perumusan dan penetapan kebijakan negara. Maka, dalam hal ini, partai politik memiliki fungsi untuk menyerap, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi tersebut kepada instansi pemerintahan terkait (UU No. 2 Tahun 2011, Pasal 11 huruf C). maka, regulasi ini tervalidasi dalam perspektif teori yang disampaikan oleh Budiardjo (2008) bahwa salah satu fungsi partai politik Adalah sebagai penghubung antara Masyarakat dengan pemerintah. Hal tersebut senada dengan regulasi berikutnya pada pasal yang sama bahwa partai politik Adalah sarana bagi warga negara Indonesia untuk berpartisipasi dalam agenda-agenda politik (UU No. 2 Tahun 2011, Pasal 11 huruf d). terakhir, UU No. 2 Tahun 2011 juga mengamanatkan bahwa Partai Politik sejatinya memiliki peranan dalam proses untuk mengisi jabatan-jabatan politik dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Proses keterlibatan ini harus melalui mekanisme demokrasi, yang pada akhirnya diharapkan dapat menempatkan kadernya dalam posisi yang relevan dengan kemampuan dan kapasitasnya. Idealnya, proses ini tidak semata diambil secara reaksioner maupun pragmatis-politik saja, tetapi harus menggunakan prinsip meritokrasi (UU No. 2 Tahun 2011, Pasal 11 huruf e). Maka, partai politik harus menjadi inkubator bagi pejabat-pejabat yang berkualitas dan kompeten melalui proses rekrutmen politik, yang di dalamnya termaktub pola pendidikan politik dan internalisasi ideologi partai, sehingga kader partai tersebut dapat menjalankan amanahnya sebagai pejabat publik dengan kesadaran atas tanggung jawabnya kepada Masyarakat dan negara, serta dapat menjalankan ideologi partai sebagai bentuk pengejawantahan proses kaderisasi partainya.

Partai bukan hanya alat untuk memperebutkan kekuasaan, tetapi juga menjadi ruang dalam melakukan pendidikan politik, tempat bagi Masyarakat belajar tentang hak, kewajiban, dan mekanisme politik yang demokratis untuk memahami arti pentingnya suara dan keterlibatan mereka dalam menentukan arah

kebijakan publik. Partai politik sebagai organisasi yang menghimpun berbagai kepentingan politik seseorang atau kelompok tidak semata hanya membicarakan bagaimana cara merebut dan mempertahankan kekuasaan politik seperti pandangan Machiavelli (1998) bahwa politik Adalah bagaimana cara untuk merebut dan mempertahankan suatu kekuasaan.

Lebih dari itu, Huntington (1968) menambahkan bahwa partai politik juga memiliki peran kelembagaan yang mampu untuk mengorganisasikan partisipasi politik agar terarah dan konstruktif. Dalam kehidupan Masyarakat modern yang kompleks, aspirasi politik acapkali hadir secara beragam dan tersebar. Di sanalah letak peranan partai politik dalam mengarahkan energi politik Masyarakat melalui saluran yang sah dan institusional. Melalui cara ini, partai politik dapat membantu mencegah timbulnya partisipasi yang sifatnya anarkis yang dapat mengancam stabilitas politik, dalam konteks yang lebih jauh, bagi Dahl (1971) partai politik menjadi elemen kunci dalam menjaga sistem demokrasi yang dapat menjamin adanya partisipasi luas dan kebebasan berposisi. Hadirnya partai dapat memastikan bahwa Masyarakat memiliki wadah yang sah untuk menyampaikan pandangan politik yang berbeda, sehingga mendorong terciptanya kompetisi politik yang sehat dan inklusif.

Pendidikan politik bertujuan untuk menghadirkan Masyarakat yang cerdas secara politik. Seperti yang disampaikan Easton (1965) bahwa sistem politik yang stabil membutuhkan dukungan dari masyarakatnya. Namun, dukungan tersebut tidak akan hadir apabila tidak adanya pendidikan politik yang baik, maka menjadi penting fungsi pendidikan politik dalam meningkatkan dan menjaga stabilitas politik suatu negara. Walaupun tidak dapat dipungkiri, pendidikan politik tidak menjadi hal yang bebas hambatan. Feith (1999) menjelaskan secara spesifik tentang politik di Indonesia, bahwa lemahnya kaderisasi partai terjadi akibat orientasi kekuasaan yang terlalu pragmatis, hal ini berimplikasi pada pendidikan politik yang seharusnya membangun kesadaran ideologis menjadi mobilisasi massa. Akhirnya, esensi pendidikan politik tidak terejawantahkan dengan baik, dan justru melahirkan partisipasi pragmatis dari Masyarakat itu sendiri. Krisis kepercayaan Masyarakat terhadap partai politik juga pada akhirnya menghambat proses pendidikan politik, narasi-narasi koruptif dan elitis yang melekat pada perspektif Masyarakat kemudian

melahirkan skeptis terhadap pesan-pesan pendidikan politik yang coba disampaikan oleh partai politik. Pada akhirnya, keberhasilan pendidikan politik bergantung pada kredibilitas partai politik sebagai lembaga moral dan sosial, bukan sekedar alat elektoral.

Dalam hal ini, pendidikan politik di tubuh partai politik Indonesia kerap menghadapi paradoks, di satu sisi diamanatkan sebagai kewajiban konstitusional, namun di sisi lain implementasinya acap kali tereduksi menjadi seremoni tahunan yang sarat simbol namun minim penghayatan makna oleh kadernya sendiri. Firmanzah (2012) menyebut bahwa kaderisasi sebagai strategi pengembangan sumber daya manusia partai politik guna memastikan regenerasi kepemimpinan dan keberlanjutan ideologis. Kaderisasi juga menjadi proses sistematis dalam membangun kualitas kader dari tahap paling awal hingga nantinya siap menjadi pemimpin politik. Dengan demikian, pendidikan politik dan kaderisasi merupakan dua sisi yang saling melengkapi dalam membangun daya tahan partai politik terhadap perubahan politik yang dinamis.

Dalam pandangan Sartori (1976), kekuatan dan stabilitas partai politik baginya sangat bergantung pada kemampuan partai politik tersebut dalam melakukan kaderisasi. Tanpa mekanisme rekrutmen dan pembinaan kader yang berkualitas, partai politik justru dapat terjebak dalam politik yang elitis bahkan kehilangan kekuatan-kekuatan sosial di tingkat akar rumput. Dalam proses rekrutmen dan penjangkaran kader, Katz & Mair (1995) menjelaskan bahwa partai modern memiliki kecenderungan dalam mengembangkan sistem rekrutmen secara terbuka untuk memperluas basis sosial dan legitimasi publiknya. Walaupun, tingkat efektivitas pola ini akan sangat bergantung pada sejauh mana partai politik dapat melakukan seleksi anggota secara merit. Tujuan daripada dilakukannya rekrutmen dan penjangkaran kader Adalah mencari orang-orang yang memiliki potensi secara ketertarikan terhadap nilai-nilai partai politik. Sehingga, partai politik bukan hanya memilih orang-orang yang memiliki potensi, tetapi juga melakukan penyaringan ideologis untuk memastikan bahwa calon kader memiliki pemahaman terhadap visi dan arah perjuangan partai politik. Dalam proses kaderisasi partai politik, sangat penting dilakukannya pendidikan dan pembinaan bagi kader, terutama kader-kader baru. Dijelaskan oleh Almond (1960), proses sosialisasi politik ini memiliki tujuan

untuk mentransfer nilai-nilai politik serta menanamkan budaya demokratis dalam diri para kader.

Partai politik kemudian juga berperan sebagai agen sosialisasi politik formal yang membentuk orientasi politik kader agar sejalan dengan ideologi partai politik tersebut. contohnya seperti yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang memiliki program Kemah Restorasi sebagai bentuk pendidikan, pembinaan, dan konsolidasi internal partai bagi para kadernya dalam membentuk soliditas dan kesetupahaman partai. Pada tahapan akhir proses kaderisasi partai politik, partai politik akan melakukan penempatan dan evaluasi untuk kadernya sesuai dengan kapasitas, kapabilitas, dan loyalitas, baik penempatan dalam struktur internal kepengurusan partai, maupun eksternal partai-menentukan posisi politik yang akan diusung atau diduduki kader. Bukan hanya penempatan, tetapi partai politik juga harus melakukan evaluasi secara rutin untuk menjaga kualitas kinerja, integritas, dan komitmen kader, sehingga partai dapat memastikan bahwa kader yang ditempatkan sudah sesuai dengan kapabilitas dan loyalitasnya, bukan hanya sekedar transaksi politik. Seperti yang disampaikan Young (1958) dalam teori meritokrasi, bahwa partai politik yang baik harus menempatkan kader berdasarkan kemampuan dan kontribusinya, bukan karena kedekatan pribadi atau bahkan modal ekonominya. Tanpa adanya prinsip meritokrasi ini, sistem kaderisasi hanya akan menjadi formalitas partai yang pada akhirnya gagal menjadi inkubator calon pemimpin berkualitas. Karena, kembali pada narasi “pendidikan politik”, proses kaderisasi partai politik dalam pandangan Dewey (1916) menjadi bentuk pendidikan politik dari partai untuk kadernya secara internal sebagai upaya dalam membangun kesadaran sosial dan tanggung jawab politik, sehingga para kader pada akhirnya juga memiliki pemahaman bahwa makna kekuasaan bukan sekedar sesuatu yang diperebutkan hanya untuk alat mendominasi, tetapi sebagai medium dalam melakukan pengabdian terhadap Masyarakat.

Namun demikian, proses pendidikan dan kaderisasi saja tidak cukup tanpa adanya konsolidasi organisasi yang kuat. Samuel P. Huntington (1968) menegaskan bahwa pelembagaan partai politik melalui konsolidasi merupakan syarat bagi stabilitas sistem politik yang demokratis. Konsolidasi partai berfungsi memperkuat

kesatuan ideologis, koordinasi struktural antara pengurus pusat dan pengurus daerah, serta membangun loyalitas kader terhadap nilai dan struktur partai (Panebianco, 1988). Partai politik pada akhirnya menjadi pilar utama dalam demokrasi modern yang berfungsi sebagai penghubung antara negara dan Masyarakat dengan menyalurkan aspirasi rakyat, melakukan seleksi terhadap calon pemimpin politik, serta membentuk kebijakan publik yang dilakukan melalui mekanisme perwakilan. Namun, untuk memastikan fungsi tersebut berjalan dengan efektif, maka partai politik perlu memastikan tingkat institusionalisasi partai politik sudah pada tahap yang tinggi dibersamai dengan stabilitas partai yang kuat.

Untuk mewujudkan institusionalisasi dan stabilitas partai politik, maka, diperlukan adanya proses konsolidasi. Linz & Stepan (1996) menjelaskan bahwa demokrasi hanya bertahan jika telah mencapai tahap konsolidasi bahwa demokrasi hanya bertahan jika telah mencapai tahap konsolidasi demokratis, yaitu bagaimana semua aktor politik menganggap prosedur demokratis sebagai satu-satunya regulasi yang sah. Artinya, konsolidasi bukan hanya sekedar adanya stabilitas formal, namun juga mencakup internalisasi nilai dan budaya demokrasi ke dalam struktur dan perilaku politik dari partai tersebut. tujuan utama dari konsolidasi bagi partai politik adalah menciptakan stabilitas internal partai politik tersebut, yang mana stabilitas dapat dikatakan terwujud apabila struktural partai berjalan dengan teratur, tidak terjadinya konflik-konflik internal partai yang destruktif dan dapat mengganggu perencanaan kinerja partai baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, serta juga tidak bergantung pada tokoh tertentu dalam menjaga eksistensial partai. Bagi Panebianco (1988), partai politik yang stabil adalah partai politik yang mekanisme organisasinya mapan, sistem kepengimpinannya teratur, serta memiliki kader-kader yang loyal dan kuat terhadap aturan serta nilai-nilai kepartaian. Untuk mewujudkan stabilitas internal partai politik dibutuhkan kejelasan struktur dan prosedur keorganisasian yang jelas, seperti regulasi yang mengatur masa jabatan, kemudian mekanisme pengambilan Keputusan yang demokratis, hingga sistem penyelesaian konflik internal yang transparan. Randall & Svasand (2002) mengatakan bahwa konsolidasi internal partai politik merupakan indikator penting dari tingkat institusionalisasi partai, di mana partai mampu mempertahankan kesinambungan meski terjadi perubahan elite maupun pergantian kepemimpinan.

Selain menciptakan stabilitas internal partai, konsolidasi juga dapat memperkuat identitas dan ideologi partai politik. Identitas ideologi berperan penting sebagai arah dan dasar perjuangan partai, sekaligus menjadi faktor pembeda dengan partai lainnya. Tanpa adanya ideologi partai yang jelas, maka kecenderungan partai akan bersifat pragmatis dan oportunis yang pada akhirnya dapat melemahkan hubungan emosional serta ideologis antara partai dengan konstituennya. Dalam pandangan Gunther & Diamond (2003), kekuatan dari identitas ideologis partai politik merupakan salah satu ciri dari partai politik yang sudah terkonsolidasi, karena dapat menghadirkan kejelasan arah politik dan konsistensi kebijakan. Ideologi kemudian juga berfungsi sebagai alat kaderisasi politik yang efektif. Dengan melalui pendidikan politik yang berbasis pada nilai dan ideologi, partai politik dapat menanamkan kesadaran politik dan loyalitas kader terhadap perjuangan partai. Menurut Panebianco (1988), keberhasilan sebuah partai dalam membangun kohesi internal sangat dependen pada kapabilitas partai politik tersebut dalam menginternalisasikan ideologi kepada kader-kadernya. Maka, memperkuat identitas dan ideologi partai politik bukan sekedar memperjelas platform politik, tetapi juga membangun komitmen kolektif terhadap cita-cita politik yang diperjuangkan partai.

Huntington (1968) mengatakan bahwa pelembagaan partai politik menjadi proses di mana partai politik dan prosedurnya memperoleh nilai dan stabilitas. Dalam konteks partai politik, institusionalisasi menandakan bahwa partai tidak hanya menjadi instrument kekuasaan semata, tetapi juga berfungsi sebagai institusi yang memiliki “aturan main”, norma, dan mekanisme internal yang berkesinambungan. Institusionalisasi pada akhirnya bukan hanya bicara tentang kepentingan elektoral, melainkan juga mencakup dimensi yang lebih luas. Dalam konteks negara-negara berkembang, institusionalisasi partai masih menghadapi berbagai tantangan, misal saja masih berkegantungannya eksistensial partai terhadap nama besar tokoh partai politik tersebut, kemudian juga lemahnya struktur kaderisasi, dan juga kepercayaan publik yang rendah terhadap partai politik (Ufen, 2008).

Kerangka institusionalisasi dan konsolidasi tersebut pada akhirnya tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya instrument konkret yang menerjemahkannya ke

dalam praktik. Partai politik memerlukan program nyata yang berfungsi ganda, sebagai sarana pendidikan politik dan juga sebagai mekanisme konsolidasi organisasi. Di titik inilah program pendidikan politik internal partai menjadi relevan untuk dikaji secara mendalam, sebab program semacam ini tidak semata-mata dijalankan sebagai kewajiban administratif, melainkan berfungsi sebagai instrument strategis yang mengikat kader secara ideologis maupun emosional terhadap partai.

Dalam konteks ini, Partai NasDem sebagai salah satu partai politik yang lahir pada era reformasi memiliki program strategis bernama Kemah Restorasi, yang dirancang sebagai wadah pembinaan kader dan sarana memperkuat konsolidasi organisasi. Program ini tidak hanya dibentuk sebagai kegiatan seremonial, melainkan sebagai bentuk konkret pendidikan politik bagi kader dan simpatisan, serta sebagai instrument konsolidasi antara pengurus pusat dan daerah di berbagai provinsi, termasuk di Jawa Barat. Program Kemah Restorasi menggabungkan unsur pola penguatan internal partai dan pendidikan politik dengan bentuk kegiatan berkemah di alam terbuka (NasDem Jabar, 2022).

Program pendidikan politik dalam partai politik tidak dapat dipahami semata-mata sebagai rangkaian aktivitas formal yang dirancang oleh organisasi, melainkan sebagai Tindakan sosial yang memperoleh makna melalui pengalaman subjektif para pelakunya. Blumer melalui teori interaksionisme simbolik menjelaskan bahwa makna tidak bersifat melekat secara inheren pada suatu objek atau kegiatan, melainkan dihasilkan melalui proses interaksi sosial dan ditafsirkan secara terus-menerus oleh individu (Blumer, 1969). Dalam pandangan Blumer, manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna yang dimiliki sesuatu tersebut bagi mereka, dan makna itu muncul dari interaksi sosial serta dimodifikasi melalui proses interpretasi. Dengan demikian, program Kemah Restorasi dapat dipahami sebagai arena interaksi simbolik, di mana makna pendidikan politik dibentuk melalui dialog, simbol partai, ritual organisasi, serta relasi antar kader lintas wilayah dan struktur.

Melalui perspektif Blumer (1969), muncul persoalan terkait bagaimana kader Partai NasDem menginterpretasikan program Kemah Restorasi dalam

pengalaman konkret mereka. Terdapat kemungkinan adanya perbedaan antara makna yang dikonstruksikan oleh elite atau struktur partai dengan makna yang dipahami oleh kader di tingkat pelaksana. Perbedaan pemaknaan ini menjadi krusial, karena dalam kerangka Tindakan sosial, makna subjektif kader akan menentukan sejauh mana mereka membangun keterikatan emosional, loyalitas organisasi, serta jejaring internal yang menopang konsolidasi partai.

Program Kemah Restorasi merupakan agenda rutin tahunan Partai NasDem yang diikuti oleh kader-kader Partai NasDem, serta dirancang di dalam kerangka ideologis Partai NasDem, yaitu “Restorasi Indonesia”, sebagai sebuah sarana pembinaan, pelatihan, serta pendidikan kader melalui pendekatan kolektif kolegial. Pada dasarnya, program Kemah Restorasi merupakan kegiatan pelatihan internal kader yang menggabungkan pembekalan wawasan kepartaian, internalisasi nilai-nilai restorasi, peningkatan solidaritas antar-kader, serta pengembangan kepemimpinan secara kolektif. Kegiatan Kemah Restorasi dilaksanakan dengan mengundang para pengurus dan kader Partai NasDem pada tingkatan tertentu seperti Dewan Pimpinan Wilayah (Provinsi), Dewan Pimpinan Daerah (Kota/Kabupaten), Dewan Pimpinan Cabang (Kecamatan), Dewan Pimpinan Ranting (Desa/Kelurahan), untuk menjalani forum interaktif dengan mengedepankan kerja sama tim, diskusi ideologis, serta penguatan motivasi politik. Hal ini menjadi upaya Partai NasDem dalam membentuk kader-kader yang bukan hanya memiliki pemahaman terkait gagasan dan ideologi restorasi secara konseptual, tetapi, juga memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan gagasan tersebut dalam praktik politik dan bersosial di Tengah Masyarakat. Kemah Restorasi juga menjadi strategi internal Partai NasDem dalam memperkuat kohesi dan kesiapan kader dalam menghadapi dinamika politik, termasuk agenda electoral dan penguatan basis sosial partai. Kemah Restorasi menjadi program internalisasi nilai yang menekankan pada etika politik, semangat pengabdian, serta komitmen terhadap perubahan sosial seperti yang disampaikan dalam visi Partai NasDem. Pada akhirnya, program Kemah Restorasi bukan menjadi kegiatan seremonial semata, namun, menjadi instrument strategis dalam membangun budaya organisasi dan identitas kolektif kader melalui pendidikan politik (partainasdem.id).

Penelitian ini secara spesifik memfokuskan kajian pada program Kemah Restorasi tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem provinsi Jawa Barat, di Cikole, Lembang, Kabupaten Bandung Barat pada bulan Agustus tahun 2025, yang mana fokus penelitian ini terdapat pada proses pemaknaan kader terhadap program pendidikan politik tersebut sebagai Tindakan sosial yang dibentuk melalui interaksi simbolik. Tanpa memahami bagaimana makna itu dikonstruksi dan diinternalisasi oleh kader, kontribusi pendidikan politik terhadap konsolidasi internal partai beresiko dipahami secara normative dan tidak mencerminkan realitas pengalaman kader di dalam organisasi. Adapun rangkaian kegiatan Kemah Restorasi Partai NasDem Jawa Barat, yaitu:

- 1) Rapat Kerja Wilayah Partai NasDem Jawa Barat
- 2) Konsolidasi dan Internalisasi Partai NasDem oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem melalui Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Partai NasDem
- 3) Sesi pendidikan dan pelatihan yang disampaikan oleh pemateri ahli
- 4) Kegiatan bonding peserta melalui berbagai permainan

Penelitian ini kemudian dibatasi ruang lingkup pengamatannya pada pemaknaan, pengalaman, dan interaksi sosial para kader Partai NasDem provinsi Jawa Barat yang terlibat sebagai peserta pada program Kemah Restorasi tahun 2025. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menilai keberhasilan program secara kuantitatif atau mengukur dampak elektoralnya, melainkan berfokus pada bagaimana kader memahami, menafsirkan, dan memberi makna terhadap program Kemah Restorasi tahun 2025 sebagai bagian dari proses pendidikan politik internal Partai NasDem Jawa Barat.

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, menunjukkan bahwa kajian mengenai pendidikan politik di Indonesia umumnya masih berfokus pada aspek implementasi program, efektivitas kelembagaan, serta pemenuhan fungsi normative partai politik berdasarkan amanat konstitusi melalui UU Nomor 2 tahun 2011. Mayoritas penelitian menempatkan pendidikan politik sebagai aktivitas institusional yang dinilai dari keberlanjutan program, struktur organisasi, serta output kaderisasi secara formal. Namun,

penelitian-penelitian tersebut belum memberikan perhatian yang memadai terhadap dimensi subjektif kader, terlebih bagaimana kader-kader memaknai program pendidikan politik yang mereka ikuti. Padahal, dalam perspektif sosiologi politik dan teori Tindakan sosial, makna subjektif yang dilekatkan aktor terhadap suatu aktivitas politik merupakan faktor kunci yang menentukan orientasi sikap, loyalitas ideologis, serta perilaku politik kader di dalam dan di luar organisasi partai.

Selain itu, kajian terdahulu juga cenderung menempatkan pendidikan politik dan kaderisasi sebagai proses teknis-organisatoris tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan internalisasi ideologi partai dan proses konsolidasi internal. Akibatnya, pendidikan politik sering kali dipahami sebatas sebagai sarana peningkatan kapasitas teknis kader atau mobilisasi electoral, bukan sebagai ruang pembentukan kesadaran ideologi dan koheisi organisasi partai.

Secara empiris, hingga saat ini belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji Program Kemah Restorasi tahun 2025 Partai NasDem, khususnya di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Jawa Barat, dengan menggunakan pendekatan interpretatif yang menempatkan kader sebagai subjek utama pembentuk makna. Padahal, Kemah Restorasi merupakan program strategis yang tidak hanya memuat agenda pendidikan politik, tetapi juga mengandung muatan ideologis Restorasi Indonesia serta fungsi konsolidasi struktural antarlevel kepengurusan partai.

Fenomena ini menarik untuk dikaji secara akademis karena menggambarkan bagaimana suatu partai politik menggunakan aktivitas internal seperti Kemah Restorasi untuk mencapai dua tujuan sekaligus, yaitu, (1) menjalankan fungsi pendidikan politik dan kaderisasi, serta (2) memperkuat konsolidasi internal partai. Namun, keberhasilan kedua fungsi tersebut pada dasarnya bergantung pada satu variabel yang selama ini luput dari perhatian penelitian terdahulu, yaitu makna subjektif yang dilekatkan kader terhadap program itu sendiri. Tanpa memahami makna tersebut, klaim keberhasilan Kemah Restorasi sebagai instrument pendidikan politik hanya berhenti pada tataran normatif-institusional, tanpa benar-benar merefleksikan pengalaman dan interpretasi kader sebagai subjek yang menjalaninya. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut

dengan menganalisis secara interpretatif bagaimana kader partai NasDem di Provinsi Jawa Barat menafsirkan, memahami, dan memberi makna terhadap program Kemah Restorasi berdasarkan pengalaman empiris mereka, serta bagaimana makna tersebut berimplikasi pada internalisasi ideologi dan konsolidasi partai.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas serta *gap* penelitian yang ada, penelitian ini berfokus pada analisis makna subjektif Program Kemah Restorasi yang dilaksanakan pada tahun 2025 sebagai instrument pendidikan politik bagi kader Partai NasDem provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kader Partai NasDem Jawa Barat memaknai pengalaman mereka dalam mengikuti Program Kemah Restorasi tahun 2025 sebagai proses pendidikan politik internal yang berkaitan dengan pembentukan loyalitas organisasi dan penguatan jejaring internal antarstruktur Partai NasDem Jawa Barat?
2. Bagaimana proses interaksi sosial selama Program Kemah Restorasi tahun 2025 membentuk pemaknaan kader terhadap nilai, identitas, dan relasi organisasi dalam Partai NasDem provinsi Jawa Barat

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis pemaknaan kader Partai NasDem Jawa Barat terhadap program Kemah Restorasi tahun 2025 sebagai proses pendidikan politik dalam organisasi partai, serta menjelaskan implikasinya terhadap dinamika konsolidasi internal partai. Menjelaskan dampak Program Kemah Restorasi terhadap penguatan ideologi, kapasitas kader, dan soliditas organisasi Partai NasDem provinsi Jawa Barat.

1. Memahami bagaimana kader Partai Nasdem provinsi Jawa Barat memaknai pengalaman mereka dalam mengikuti program Kemah Restorasi tahun 2025 sebagai proses pendidikan politik internal partai, serta menginterpretasikan

implikasi pemaknaan kader terhadap program Kemah Restorasi tahun 2025 dalam kaitannya dengan pembentukan loyalitas organisasi dan penguatan jejaring internal antarstruktur Partai NasDem Provinsi Jawa Barat

2. Menganalisis bagaimana proses interaksi dalam Program Kemah Restorasi tahun 2025 membentuk pemaknaan kader terhadap nilai, identitas, dan relasi organisasi internal Partai NasDem provinsi Jawa Barat.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu politik, khususnya dalam kajian tentang pendidikan politik, kaderisasi partai politik, dan kelembagaan partai politik. Hasil penelitian ini dapat memperkaya pemahaman tentang bagaimana program pendidikan politik internal partai dapat ditinjau melalui interpretasi kader-kader partai yang menjadi peserta program pendidikan tersebut. Lebih dari itu, belum ada penelitian sebelumnya yang mengkaji terkait pendidikan politik dan konsolidasi partai dengan studi interpretatif dari kader-kader partai, juga belum ada penelitian yang meneliti Program Kemah Restorasi Partai NasDem secara spesifik. Maka, penelitian ini dapat memberikan kebaharuan penelitian yang menambah Khazanah pengetahuan politik

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi Partai NasDem provinsi Jawa Barat dalam merancang strategi kaderisasi yang lebih efektif, adaptif, dan kontekstual dengan kebutuhan daerah, khususnya di Jawa Barat. Selain itu, temuan penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi partai politik lain dalam mengembangkan model pendidikan politik internal yang mampu memperkuat konsolidasi dan profesionalisme kader sebagai upaya institusionalisasi partai politik

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa Program Kemah Restorasi Partai NasDem Jawa Barat bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan sebuah arena interaksi sosial dan komunikasi kolektif yang di dalamnya terjadi proses pembentukan makna secara aktif oleh para kader yang terlibat. Fenomena ini menarik untuk dikaji secara akademis karena di dalamnya terdapat dua dimensi yang saling berkaitan, yaitu pendidikan politik sebagai proses internalisasi nilai dan ideologi partai, serta konsolidasi internal sebagai proses penguatan jejaring dan loyalitas antarstruktur organisasi.

Dalam penelitian ini, yang menjadi fokusnya adalah interpretasi kader Partai NasDem Jawa Barat, yang kemudian hal tersebut akan menghasilkan suatu makna. Untuk menganalisis fenomena tersebut secara komprehensif, penelitian ini menggunakan dua teori yang bekerja secara komplementer dalam satu paradigma interpretative, yaitu Teori Interaksionisme Simbolik Herbert Blumer sebagai teori utama, dan Teori Sociolinguistik Dell Hymes sebagai teori pendukung. Menurut Blumer (1969), makna adalah suatu hal yang bersifat sosial dan interpretative, tidak melekat secara tetap terhadap objek peristiwa, atau Tindakan. Blumer menegaskan bahwa manusia bertindak terhadap suatu hal didasari oleh makna dari hal tersebut bagi mereka. Maka, makna menjadi dasar utama yang mengarahkan Tindakan manusia dalam kehidupan sosial. Makna lahir dari proses interaksi sosial yang kemudian terbentuk ketika tiap individu berinteraksi dengan individu lainnya dengan menggunakan simbol-simbol seperti Bahasa, gestur, atau tanda-tanda tertentu. Makna juga tidak bersifat statis, sebaliknya, makna justru bersifat dinamis. Setiap individu tidak menerima makna yang sudah ada, melainkan secara aktif menafsirkan makna tersebut melalui proses interpretasi internal yang dilakukan dengan dialog batin, bagaimana Tindakan harus dilakukan berdasarkan makna yang dipahami. Dalam penelitian ini, orientasi Tindakan tersebut dipahami melalui dua dimensi utama, yaitu loyalitas organisasi dan penguatan jejaring internal antarstruktur partai.

Maka, makna menjadi penting perannya sebagai indikator dalam penelitian ini untuk mengetahui dan menilai bagaimana interpretasi serta impresi

para kader Partai NasDem Jawa Barat dalam mengikuti Program Kemah Restorasi tahun 2025. Untuk memahami Program Kemah Restorasi sebagai bentuk pendidikan politik yang dihadirkan oleh Partai NasDem provinsi Jawa Barat, perlu untuk mengetahui bagaimana para kader-yang menjadi peserta kegiatan-memberikan makna terhadap Program Kemah Restorasi berdasarkan pengalaman empirisnya. Sehingga, dengan mengetahui dan memahami interpretasi kader terhadap Program Kemah Restorasi, maka, dapat mengetahui juga bagaimana Program Kemah Restorasi hadir sebagai stimulus pengetahuan dan kesadaran politik bagi para kader Partai NasDem Jawa Barat.

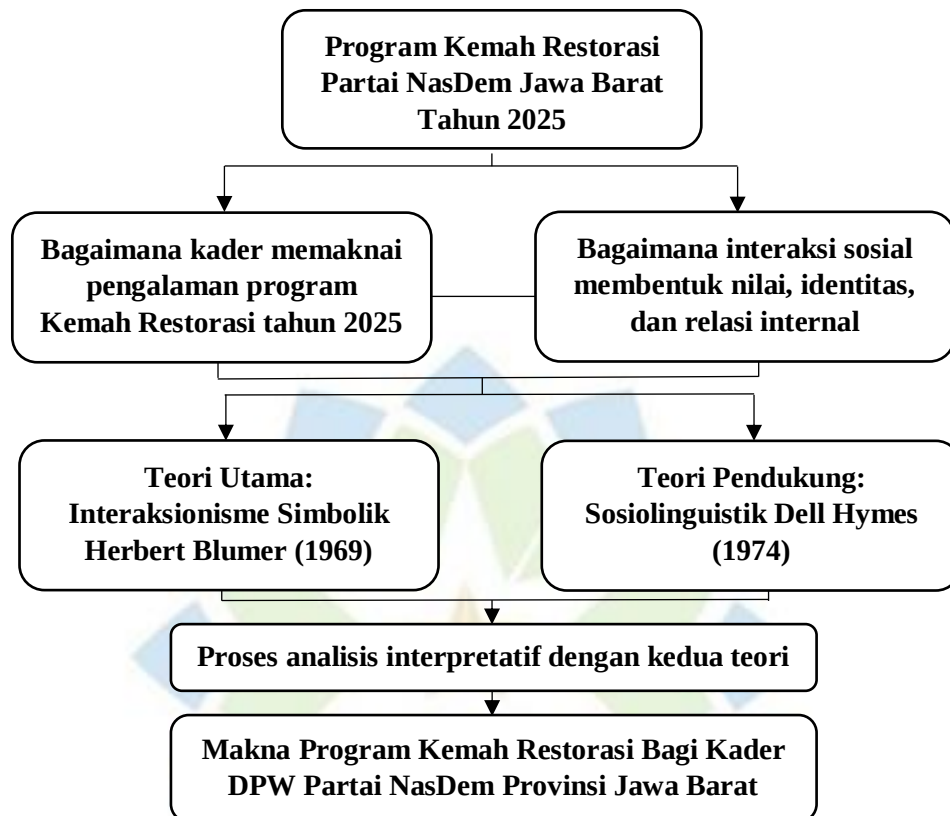
Restorasi secara etimologis berasal dari Bahasa Latin “*restaurare*” yang artinya adalah memulihkan, memperbaiki, atau mengembalikan ke kondisi semula. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), restorasi dapat diartikan sebagai proses pemulihan atau pengembalian kondisi suatu hal menjadi seperti semula atau lebih baik setelah mengalami kerusakan atau penurunan. Pada konteks sosial dan politik, restorasi dapat dimaknai bukan sekedar proses pemulihan yang sifatnya fisik, tetapi juga pemulihan nilai-nilai fundamental kehidupan, dalam hal ini, restorasi diartikan sebagai usaha reflektif untuk merekonstruksi prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, kebebasan, moralitas publik, dan legitimasi politik.

Restorasi menjadi ideologi politik yang dewasa ini digunakan dan dijalankan oleh Partai NasDem dalam menjalankan Gerakan-gerakan politiknya. Restorasi sebagai ideologi Partai NasDem dipahami sebagai upaya pembaharuan tatanan politik yang demokratis, berintegritas, dan berkeadilan setelah Indonesia mengalami degradasi akibat praktik korupsi, oligarki, dan disfungsi institusi demokrasi (NasDem, 2013). Restorasi-oleh Partai NasDem-juga dimaknai sebagai suatu Gerakan perubahan untuk memperbaiki sistem politik dan tata Kelola negara melalui mekanisme demokrasi dan konstitusi, bukan melalui revolusi (NasDem, 2014). Restorasi kemudian juga menjadi bentuk kritik Partai NasDem terhadap status Quo, bahwa bagaimana pasca reformasi demokrasi procedural dirasa belum cukup, sehingga Partai NasDem merasa perlu adanya restorasi nilai demokrasi substantif.

Teori Interaksionisme Simbolik Blumer (1969) menjadi landasan utama penelitian ini karena secara langsung menjawab fokus penelitian pada dimensi pemaknaan. Blumer menegaskan tiga premis fundamental. Pertama, manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna yang dimiliki sesuatu tersebut bagi mereka. Kedua, makna tersebut lahir dari proses interaksi sosial antarindividu. Dan ketiga, makna dimodifikasi melalui proses interpretasi yang terus-menerus dan bersifat dinamis. Dalam kerangka ini, kader Partai NasDem Jawa Barat dipahami sebagai subjek aktif yang menafsirkan pengalaman mereka dalam Kemah Restorasi. Pemaknaan yang terbentuk dari interaksi tersebut kemudian berimplikasi pada dua dimensi utama, yaitu pembentukan loyalitas organisasi dan penguatan jejaring internal antarstruktur partai.

Teori Sociolinguistik Hymes (1974) digunakan sebagai teori pendukung yang melengkapi Blumer pada dimensi komunikasi. Hymes menawarkan model SPEAKING sebagai kerangka analisis yang memungkinkan peneliti membedah secara sistematis bagaimana konteks dan proses komunikasi dalam sebuah peristiwa tutur bekerja dalam memproduksi makna. Dalam perspektif Hymes, program Kemah Restorasi dapat dipahami sebagai *speech event*. Kader yang terlibat membentuk *speech community* yang berbagi ideologi, simbol, dan norma komunikasi internal partai. Melalui model SPEAKING, peneliti dapat menganalisis bagaimana setiap komponen komunikasi dalam Kemah Restorasi bekerja secara integratif sebagai medium yang memungkinkan makna itu diproduksi dan dinegosiasikan oleh para kader.

Integrasi kedua teori ini menghasilkan kerangka analisis yang berlapis dan saling melengkapi. Blumer memberikan lensa untuk melihat “apa” dan “mengapa” makna terbentuk dari interaksi kader dalam Kemah Restorasi, sementara Hymes memberikan alat untuk membedah “bagaimana” konteks komunikasi yang melatarbelakangi interaksi tersebut bekerja dalam memproduksi makna itu. *Output* akhir dari proses analisis ini adalah pemahaman mendalam tentang makna program Kemah Restorasi bagi kader Partai NasDem Provinsi Jawa Barat, yang pada akhirnya berimplikasi pada dinamika institusionalisasi partai melalui penguatan loyalitas organisasi dan jejaring internal antarstruktur.



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir